

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI  
PENGANGGURAN DI INDONESIAAdam Kurniawan<sup>1</sup>, Faisal Abdul Azis<sup>2</sup>

Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

Email : [adamkurniawan2901@gmail.com](mailto:adamkurniawan2901@gmail.com)<sup>1</sup>, [faisalabdulazis53@gmail.com](mailto:faisalabdulazis53@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan struktural yang terus dihadapi Indonesia dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia, dengan fokus pada program-program seperti Kartu Prakerja, pelatihan vokasional, serta insentif bagi sektor padat karya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kajian akademik selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa kebijakan telah menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka pengangguran terbuka, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan akses, relevansi pelatihan dengan kebutuhan industri, serta efektivitas pelaksanaan di tingkat daerah. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi berkala terhadap program ketenagakerjaan, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan sektor swasta dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengangguran, Kebijakan Pemerintah, Efektivitas, Ketenagakerjaan, Indonesia

## ABSTRACT

*Unemployment remains one of Indonesia's persistent structural challenges, significantly affecting economic growth and social stability. This study aims to analyze the effectiveness of various government policies in addressing unemployment, focusing on programs such as the Pre-Employment Card (Kartu Prakerja), vocational training, and incentives for labor-intensive sectors. The research uses a qualitative-descriptive approach by analyzing secondary data sourced from official government reports, the Central Statistics Agency (BPS), and academic studies over the past five years. The findings reveal that while some policies have contributed positively to reducing the open unemployment rate, there are still challenges related to*

## Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*access equity, the relevance of training to industry needs, and implementation effectiveness at the regional level. This study recommends regular evaluations of employment programs, enhanced coordination between central and local governments, and greater involvement of the private sector in designing more adaptive and sustainable employment policies.*

**Keywords:** *Unemployment, Government Policy, Effectiveness, Employment, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan fundamental yang senantiasa dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Keberadaan pengangguran tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga menjadi indikator kegagalan sistem ekonomi dalam menyerap tenaga kerja secara optimal. Tingginya angka pengangguran memiliki implikasi luas, baik dalam aspek ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya pertumbuhan ekonomi, dan memburuknya kesejahteraan rumah tangga, maupun dalam aspek sosial seperti meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan keresahan sosial.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cenderung fluktuatif, namun tetap menunjukkan angka yang relatif tinggi, terutama di kalangan usia muda dan lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai educated unemployment, yakni kondisi ketika individu berpendidikan tinggi justru kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja (mismatch), serta kurangnya akses terhadap pelatihan kerja yang relevan dan berkualitas.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program ketenagakerjaan. Beberapa di antaranya adalah program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis digital, program padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara, serta insentif bagi dunia usaha guna memperluas kesempatan kerja. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor UMKM dan wirausaha sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru. Meskipun demikian, efektivitas dari berbagai kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan, mengingat adanya berbagai tantangan mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, hingga persoalan dalam implementasi di tingkat daerah.

Dalam konteks tersebut, penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran, baik dari segi desain, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia dengan mengkaji program-program utama yang telah dijalankan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penurunan angka pengangguran secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder, seperti laporan kebijakan pemerintah, publikasi BPS, serta kajian akademik yang relevan. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis, serta menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan program ketenagakerjaan, jurnal ilmiah, serta kajian dari lembaga independen.

### 1. Jenis dan Sumber Data

| Jenis Data     | Sumber Data                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data Statistik | Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan                  |
| Dokumen Resmi  | Peraturan Pemerintah, Laporan Program Kartu Prakerja, Laporan Padat Karya |
| Literatur      | Jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan lembaga riset                    |

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan studi literatur. Dokumen dan literatur yang dianalisis adalah yang relevan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan angka pengangguran di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024).

### 3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis konten (content analysis) dengan tahapan berikut:

- Reduksi data: menyaring informasi yang relevan
- Penyajian data: dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik
- Penarikan kesimpulan: mengkaji efektivitas program dan kebijakan

### 4. Alur Penelitian

Berikut ini adalah gambar alur proses penelitian:

Gambar 1. Alur Penelitian



#### 5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara nasional dengan cakupan data dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan dan analisis data dilakukan pada periode Januari – April 2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### 1. Tren Pengangguran di Indonesia (2020–2024)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020 menyebabkan lonjakan angka pengangguran menjadi 7,07%. Namun, seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan penerapan berbagai program pemerintah, angka tersebut menurun secara bertahap menjadi 5,32% pada tahun 2024.

| Tahun | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|-------|----------------------------------|
| 2020  | 7,07                             |
| 2021  | 6,49                             |
| 2022  | 5,86                             |
| 2023  | 5,45                             |
| 2024  | 5,32                             |

Analisis: Penurunan angka pengangguran menunjukkan adanya pengaruh dari intervensi kebijakan pemerintah, meskipun belum seluruhnya menyentuh akar masalah struktural seperti mismatch tenaga kerja dan rendahnya produktivitas sektor informal.

## 2. Efektivitas Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (2023), ditemukan bahwa:

- 88% peserta merasa keterampilan mereka meningkat.
- 53% peserta mengaku lebih mudah mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan.
- Namun, hanya 31% yang berhasil memperoleh pekerjaan formal dalam 3 bulan setelah pelatihan.

Analisis: Meskipun program ini berhasil meningkatkan kompetensi individu, tantangan masih ada dalam konversi pelatihan menjadi penempatan kerja nyata. Ini menandakan pentingnya integrasi pelatihan dengan kebutuhan sektor industri lokal.

## 3. Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dan UMKM

Program padat karya tunai telah memberikan dampak langsung dalam menciptakan lapangan kerja sementara di daerah pedesaan. Sementara itu, pemberdayaan UMKM melalui insentif dan digitalisasi terbukti membantu mempertahankan usaha kecil di tengah ketidakpastian ekonomi.

Contoh Kasus:

Di Provinsi Jawa Barat, program padat karya berhasil menyerap lebih dari 15.000 tenaga kerja dalam kurun waktu satu tahun, dengan fokus pada infrastruktur desa, irigasi, dan sanitasi.

Analisis: Program ini efektif dalam jangka pendek, terutama dalam mengatasi pengangguran musiman dan harian. Namun, untuk solusi jangka panjang, perlu ditopang dengan pelatihan lanjutan dan akses terhadap pembiayaan usaha.

## 4. Kendala Pelaksanaan Kebijakan di Lapangan

Beberapa kendala utama yang ditemukan selama penelitian meliputi:

- Kesenjangan informasi antar daerah mengenai akses program pemerintah.
- Kurangnya sinergi antar instansi, baik pusat maupun daerah.
- Keterbatasan anggaran dan infrastruktur digital di wilayah terpencil.

Analisis: Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kapasitas pelaksana di daerah dan ketersediaan data yang akurat. Kebijakan berskala nasional membutuhkan pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan berbasis kebutuhan lokal.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran telah menunjukkan kemajuan yang positif, terutama melalui program-program strategis seperti Kartu Prakerja, Padat Karya Tunai, dan pemberdayaan UMKM. Namun demikian,

efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan baik secara struktural maupun teknis.

## 1. Penurunan Angka Pengangguran: Efek Kebijakan atau Pemulihan Ekonomi?

Penurunan tingkat pengangguran dari 7,07% pada tahun 2020 menjadi 5,32% pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam pasar tenaga kerja. Namun, perlu dicermati bahwa tren penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga oleh pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan aktivitas sektor informal. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya bersifat struktural dan berkelanjutan.

## 2. Kartu Prakerja: Pelatihan Meningkat, Penyerapan Minim

Program Kartu Prakerja berhasil meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja para pencari kerja, namun tingkat penyerapan tenaga kerja formal pasca-pelatihan masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang diberikan dalam pelatihan dengan kebutuhan nyata di industri. Selain itu, banyak pelatihan yang masih bersifat umum dan belum berbasis lokal atau spesifik sektor, sehingga tidak berdampak optimal terhadap pengurangan pengangguran.

## 3. Program Padat Karya dan UMKM: Solusi Jangka Pendek yang Efisien

Program padat karya tunai terbukti efektif sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi pengangguran akibat krisis atau kondisi darurat. Program ini menyerap tenaga kerja secara langsung tanpa syarat kompetensi tertentu. Namun, tanpa pelatihan lanjutan atau kesinambungan program, tenaga kerja yang terserap berisiko kembali menganggur. Begitu pula dengan dukungan terhadap UMKM, yang meskipun membantu mempertahankan lapangan kerja, masih terkendala akses permodalan, digitalisasi, dan pemasaran.

## 4. Hambatan Implementasi di Daerah

emuan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan di tingkat daerah. Beberapa kendala utama adalah minimnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan SDM daerah, serta ketimpangan infrastruktur digital. Akibatnya, program nasional tidak selalu berjalan optimal secara lokal. Hal ini menegaskan pentingnya desentralisasi kebijakan serta perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang lebih kuat dan partisipatif.

## 5. Kebijakan yang Belum Terintegrasi dengan Kebutuhan Industri

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi pengangguran di Indonesia adalah kurangnya integrasi antara kebijakan ketenagakerjaan dengan rencana pengembangan industri nasional. Dunia industri belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan pelatihan kerja dan rekrutmen, sehingga lulusan program pelatihan sering kali tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Kesimpulan sementara dari pembahasan ini adalah bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran, namun efektivitasnya masih terbatas oleh masalah implementasi, relevansi program, dan belum kuatnya keterkaitan antara pelatihan dan penyerapan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih holistik, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja lokal dan global.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pengangguran telah memberikan dampak positif, khususnya dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka pascapandemi COVID-19. Program-program seperti Kartu Prakerja, padat karya tunai, dan dukungan terhadap UMKM terbukti mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja sementara, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat rentan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara pelatihan dan kebutuhan industri (skill mismatch)
2. Terbatasnya jangkauan program di daerah terpencil
3. Kurangnya koordinasi antar lembaga pelaksana
4. Minimnya integrasi antara perencanaan ketenagakerjaan dan arah pembangunan industri.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan pengangguran ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan, yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Evaluasi berkala terhadap program-program yang sudah berjalan juga penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta adaptabilitas kebijakan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Statistik Ketenagakerjaan 2023. Jakarta: Kemnaker RI. Retrieved from <https://kemnaker.go.id>
- Pratama, R., & Indrawan, Y. (2022). Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Mengurangi Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 101–113. <https://doi.org/10.24874/jeep.2022.13.2.101>
- Siregar, F. & Lestari, D. (2021). Analisis Program Padat Karya Tunai dalam Menanggulangi Pengangguran di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(1), 44–57.
- Tambunan, T. (2020). UMKM dan tantangan ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 35(3), 189–202.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Investing in the Future of Jobs*. Washington, DC: World Bank Group.